



RENCANA KERJA

RENJA TAHUN 2024

**BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SETDA MALUKU**

Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon 97124

AMBON

KATA PENGANTAR

Berkenan dengan harapan kita untuk menjadikan instansi pemerintah yang Akuntabel, Efisien, Responsive dan Transparansi guna memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, maka sudah sepatutnya dan seharusnya kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan limpahan Berkah dan Karunia-Nya yang tidak terhingga bagi bangsa dan Negara khususnya Daerah Maluku tercinta ini.

Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2023 ini merupakan gambaran rencana kerja yang komprehensif terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategi Biro Administrasi Pimpinan dalam Tahun Anggaran 2019-2024.

Semoga Rencana Kerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku Tahun 2023 ini menjadi pedoman bagi kita semua untuk meningkatkan kinerja ke depan secara lebih efektif, efisien dan akuntabel. Baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi.

Ambon, Maret 2023

Kepala Biro Administrasi Pimpinan
Setda Maluku,



Fibra Breemer, S.Pd., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19740921 200003 2 001

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA TAHUN 2022	
A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategi Perangkat Daerah	4
B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	19
D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	22
BAB III TUJUAN, DAN SASARAN	25
A. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	25
B. Program dan Kegiatan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	26
C. Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ...	29
BAB V PENUTUP	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam menyikapi kebijakan otonomi daerah dan implementasinya perlu segera dilakukan efisiensi penyelenggaraan pemerintah yang sesungguhnya adalah terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya oleh aparatur/birokrasi dalam suatu jaringan kelembagaan yang rasional, yang akan dapat menjawab tantangan pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta mewujudkan *good governance*.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 harus disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Disamping itu perlu memperhatikan lingkup kewenangan dan tanggung jawab instansi/unit kerja dan memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Unit Kerja tahun lalu serta tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku menyampaikan Renja Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2024 sebagai pelaksanaan visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Revisi Rencana Strategi (Renstra) Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku 2019-2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 79) sebagai Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 1617);
3. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Biro Administrasi Pimpinan dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Biro Humas dan Protokol Setda Maluku.

2. Tujuan

Untuk mengetahui Rencana Kerja (Renja) yang dijabarkan dalam program kerja sesuai pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kinerja, Sasaran dan Program kegiatan yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi yang diemban Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku Tahun 2024 dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022

- A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Biro Administrasi Pimpinan tahun 2022
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Bab III Tujuan dan Sasaran

- A. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
- B. Program dan Kegiatan Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- C. Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2022

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku Tahun 2022 dan Capaian Rencana Strategi Perangkat Daerah

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Biro Administrasi Pimpinan Setda. Visi yang dikembangkan sebagai acuan yang akan memayungi dan mengarahkan berbagai program pemberdayaan dalam Biro Administrasi Pimpinan Setda dalam kurun waktu 2019-2024 yaitu ;

“Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani Terjamin Dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan ”.

Visi diatas pada hakekatnya mencerminkan tanggungjawab Biro Administrasi Pimpinan Setda dalam mendukung program kerja pimpinan Daerah. Untuk mewujudkan Visi diatas maka ditetapkan misi sebagai berikut ;

- Maluku yang dikelola secara jujur, bersih dan melayani
- Maluku yang terjamin dalam Kesejahteraan
- Maluku yang berdaulat atas gugusan kepulauan

Untuk menuju pencapaian Visi diatas, maka Misi pembangunan daerah Provinsi Maluku periode 2019-2024, ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau
3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau
5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata

6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi

Dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah di atas, maka Biro Administrasi Pimpinan Setda pada tahun anggaran 2022 telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut ; memuat 1 (satu) Program, 8 (delapan) Kegiatan dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan dengan Capaian 97,20 %, dan di tahun 2022 pelaksanaan Rencana Kerja memuat 1 (satu) Program, 7 (tujuh) Kegiatan dan 15 (lima belas) Sub Kegiatan dengan Capaian 95,25 %. Dalam menjalankan Program di tahun 2023 Biro Administrasi Pimpinan Setda merancang 1 (satu) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 19 (sembil) Sub Kegiatan dengan target capaian 100 %.

Selanjutnya berkaitan dengan pencapaian target Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Biro Administrasi Pimpinan berdasarkan realisasi program dan kegiatan tahun 2024 dapat di gambarkan pada table berikut ;

B. Analisis Kinerja Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan Setda

Adapun Target Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pimpinan Setda adalah sebagai berikut : Pengukuran capaian kinerja oleh Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku pada Tahun 2023 dilakukan pada saat tahun anggaran berakhir, yaitu dengan cara membandingkan realisasi capaian indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku Tahun 2023. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih kinerja, selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna menentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Tabel 2.1

Tabel Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pimpinan Tahun 2022

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Penyediaan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat	Persentase peliputan kegiatan pemerintah daerah di dalam dan diluar daerah	100%
		Persentase terfasilitasinya komunikasi pimpinan	100%
		Persentase informasi yang tersebar	100%
2.	Terlaksananya Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan baik	Persentase kegiatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	100%
		Persentase Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%
		Persentase terlaksananya hubungan antara keprotokolan	100%
3.	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	100%

Adapun analisis pencapaian kinerja Sasaran Strategis yang dicapai oleh Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku pada tahun 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

SASARAN I	Meningkatnya Penyediaan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat
------------------	---

Hasil pengukuran Sasaran Meningkatkan Penyediaan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Capaian Sasaran Meningkatkan Penyediaan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat Tahun 2022

Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Presentase peliputan kegiatan pemerintah daerah di dalam dan di luar daerah	100	100	100
2.	Persentase terfasilitasinya komunikasi pimpinan	100	100	100
3.	Persentase informasi yang tersebar	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja				100

Tabel 2.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran I antara Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023	
		Real Kinerja	Cap. Kinerja	Real Kinerja	Cap. Kinerja	Real Kinerja	Cap. Kinerja	Real Kinerja	Cap. Kinerja
1.	Presentase peliputan kegiatan pemerintah daerah di dalam dan di luar daerah	70,30%	100 %	100%	100%	100%	100 %		
2.	Persentase terfasilitasinya komunikasi pimpinan	Indikator Kinerja ini Tidak ada dalam PK 2020	Indikator Kinerja ini Tidak ada dalam PK 2020	Indikator Kinerja ini Tidak ada dalam PK 2021	Indikator Kinerja ini Tidak ada dalam PK 2021	100%	100%		
3.	Persentase informasi yang tersebar	Indikator Kinerja ini Tidak ada dalam PK 2020	Indikator Kinerja ini Tidak ada dalam PK 2020	Indikator Kinerja ini Tidak ada dalam PK 2021	Indikator Kinerja ini Tidak ada dalam PK 2021	100%	100%		

Tabel 2.4
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran I
Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022 serta Tahun akhir periode Renstra

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022
1.	Presentase peliputan kegiatan pemerintah daerah di dalam dan di luar daerah	100 %	100 %	100 %
2.	Persentase terfasilitasinya komunikasi pimpinan	Indikator Kinerja ini Tidak ada dalam PK 2020	Indikator Kinerja ini Tidak ada dalam PK 2021	100 %
3.	Persentase informasi yang tersebar	Indikator Kinerja ini Tidak ada dalam PK 2020	Indikator Kinerja ini Tidak ada dalam PK 2021	100 %

Keberhasilan pencapaian Kinerja dari sasaran I “*Meningkatnya Penyediaan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat*” karena adanya koordinasi antara Biro Administrasi Pimpinan dengan Pimpinan Redaksi Media Massa dan Percetakan.

Berikut adalah tabel realisasi anggaran Program/Kegiatan penunjang Sasaran I :

Tabel 2.5
Realisasi Anggaran Program/ Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku / Sasaran I “Meningkatnya Penyediaan Informasi Kegiatan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku			
1.1	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	456.569.518,-	437.080.100,-	95,73%
	- Penyiapan Materi Pimpinan	329.908.600,-	327.058.600,-	99,13 %
	- Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	66.660.918,-	50.021.500,-	75,03 %
	- Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	60.000.000,-	60.000.000,-	100 %

Melihat data realisasi anggaran diatas dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran yang mencapai rata-rata 100%, maka dapat disimpulkan Biro Administrasi Pimpinan setda telah melakukan efisiensi anggaran sebesar

Rp. 437.080.100,- atau 95,73 % dari total anggaran penunjang Sasaran I yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

SASARAN II	Terlaksananya Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Baik
-----------------------	---

Hasil pengukuran Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan Pimpinan Daerah yang Prima dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6

Capaian Sasaran Terlaksananya Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Baik Tahun 2022

Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase Kegiatan Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah yang terfasilitasi	100	100	100
2.	Persentase kunjungan tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	100	100
3.	Persentase terlaksananya hubungan antara keprotokolan	100	100	100
Rata-rata Capaian Kinerja				

Tabel 2.7

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran II antara Tahun 2020, Tahun 2021 dengan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023	
		Real Kinerja	Cap. Kinerja	Real Kinerja	Cap. Kinerja	Real Kinerja	Cap. Kinerja	Real Kinerja	Cap. Kinerja
1.	Presentase kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	97%	97%	97,20%	97,20%	100 %	100 %		
2	Persentase kunjungan tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indikator Kinerja ini Tidak ada dalam PK 2020	Indikator Kinerja ini Tidak ada dalam PK 2020	Indikator Kinerja ini Tidak ada dalam PK 2021	Indikator Kinerja ini Tidak ada dalam PK 2021	100 %	100 %		
3.	Persentase	Indikator	Indikator	Indikator	Indikator	100 %	100 %		

	terlaksananya hubungan antara keprotokolan	Kinerja ini Tidak ada dalam PK 2020	Kinerja ini Tidak ada dalam PK 2020	Kinerja ini Tidak ada dalam PK 2021	Kinerja ini Tidak ada dalam PK 2021				
--	--	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--

Tabel 2.8
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran II
Tahun 2020, Tahun 2021 dan 2022 serta Tahun akhir periode Renstra

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023 - 2024
1.	Persentase kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi	97%	100%	100%	
2	Persentase kunjungan tamu dan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Indikator Kinerja ini Tidak ada dalam PK 2020	Indikator Kinerja ini Tidak ada dalam PK 2021	100%	
3.	Persentase terlaksananya hubungan antara keprotokolan	Indikator Kinerja ini Tidak ada dalam PK 2020	Indikator Kinerja ini Tidak ada dalam PK 2021	100%	

Keberhasilan pencapaian Kinerja dari Sasaran II “*Terlaksananya kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan baik*” karena adanya koordinasi antara Biro Administrasi Pimpinan Setda dengan Biro lingkup Setda yang lain.

Berikut adalah tabel realisasi anggaran Program/Kegiatan penunjang Sasaran II Indikator Kinerja 1:

Tabel 2.9

Realisasi Anggaran Program/ Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Maluku / Sasaran II “Terlaksananya kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan baik”

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	203.000.000,-	195.651.200,-	96,37 %
1.1	Fasilitas Keprotokolan	203.000.000,-	195.651.200,-	96,37 %
	- Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksana Acara	59.568.000,-	59.568.000,-	100 %
	- Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	70.440.000,-	70.440.000,-	100 %
	- Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	72.992.000,-	65.643.200,-	89,93 %

Melihat data realisasi anggaran diatas dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran yang mencapai rata-rata 100%, maka dapat disimpulkan Biro Administrasi Pimpinan Setda telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 195.651.200,- atau 96,37 % dari total anggaran penunjang Sasaran II yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

SASARAN III	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
--------------------	--

Hasil pengukuran Sasaran Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.10
Capaian Sasaran Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Tahun 2022

Indikator Kinerja		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Terwujudnya koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	100	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja				

Tabel 2.10
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran III antara Tahun 2020, Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	2020		2021		2022	
		Real Kinerja	Cap. Kinerja	Real Kinerja	Cap. Kinerja	Real Kinerja	Cap. Kinerja
1.	Terwujudnya koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	100%	100%	97%	97%	96,44	96,44

Tabel 2.11
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran III Tahun 2020, Tahun 2021 dan 2022 serta Tahun akhir periode Renstra

No	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023 - 2024
1.	Terwujudnya koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	100%	97%	96,44 %	

Keberhasilan pencapaian Kinerja dari Sasaran III “*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*” karena adanya koordinasi antara Biro Administrasi Pimpinan Setda dengan Pimpinan-pimpinan OPD dalam lingkup Sekretariat Daerah.

Berikut adalah tabel realisasi anggaran Program/Kegiatan penunjang Sasaran III:

Tabel 2.12
Realisasi Anggaran Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah	1.639.919.782,-	1.557.553.626,-	94,97 %
1	Perencanaan, Penguanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	199.845.700,-	186.738.700,-	93,44 %
1.1	- Penyusunan Dokumen Perancangan Perangkat Daerah	199.845.700,-	186.738.700,-	93,44
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000,-	78.438.400,-	78,43 %
2.1	- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	100.000.000,-	78.438.400,-	78,43 %
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	555.825.000,-	520,944,804,-	93,72 %
3.1	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.000.000,-	63.000.000,-	100 %
3.2	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	492.825.000,-	457.944.804,-	92,92 %
3.3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	747.129.082,-	741.710.722,-	99,27 %
3.4	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,-	10.000.000,-	100 %
3.5	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.000.000,-	11.000.000,-	100 %
3.6	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.911.000,-	10.911.000,-	100 %
3.7	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	715.218.082,-	709.799.722,-	99,24 %

4	Pemeliharaan Millik Penunjang Pemerintah Daerah	Barang Daerah Urusan	37.120.000	29.721.000,-	80,06 %
4.1	- Penyediaan Pemeliharaan, dan Kendaraan Oprasional Lapangan	Jasa Pemeliharaan, Pajak Perijinan Dinas atau	37.120.000,-	29.721.000,-	80,06 %

Melihat data realisasi anggaran pada Tabel di atas dan jika dibandingkan dengan capaian kinerja Sasaran yang mencapai rata-rata 100%, maka dapat disimpulkan Biro Administrasi Pimpinan Setda telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.557.553.626,- atau 94,97 % dari total anggaran yang telah dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku pada tahun anggaran 2022.

Realisasi anggaran kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran kinerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku Tahun 2022, yang terdiri dari 1 (satu) Program, 7 (tujuh) Kegiatan dan 15 (lima belas) Sub Kegiatan yang mendukung sasaran kinerja.

C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku, pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Biro Administrasi Pimpinan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil yang telah dilakukan pada analisis gambaran pelayanan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol sebelumnya.

Memperhatikan tugas dan fungsi dari Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku menunjukkan bahwa Biro Administrasi Pimpinan Setda memiliki peranan penting dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh OPD lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Maluku. Berikut ini adalah tabel Pemetaan masalah untuk menentukan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah.

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pelayanan public (ASN) belum professional dalam melayani masyarakat sebagai upaya untuk mencapai <i>feel good service</i> baik bagi masyarakat	Rendahnya sikap tanggungjawab dalam pekerjaan, ditunjukan lewat sikap tidak tepat waktu dan tidak mampu menyelesaikan tugas hingga tuntas	Masih rendahnya kemampuan ASN untuk memiliki ketrampilan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang dan jenjangnya masing-masing
2.	Penyebarluasan dan Publikasi penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk transparansi belum berjalan dengan baik	Belum optimalnya tata Kelola layanann pemerintah dalam penyelenggaraan penyebarluasan informasi dan publikasi	Kapasitas aparatur yang masih rendah dan sarana prasarana pendukung yang masih minim dan belum memadai serta kepemilikan SOP
		Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media publikasi	Terbatasnya fasilitas pendukung pemanfaatan teknologi informasi
3.	Belum terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum	Belum maksimalnya penerapan PATEN di Kabupaten/Kota
			Belum terselesaikannya permasalahan penegasan batas-batas wilayah di Provinsi Maluku
			Belum optimalnya proses pengadministrasian wilayah administrasi pemerintahan dan Kawasan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota
		Belum optimalnya pelaksanaan otonomi Daerah dan kerjasama Daerah	Belum optimalnya penyusunan dokumen LPPD sesuai ketentuan
			Belum maksimalnya penerapan SPM dalam pengintegrasian indicator SPM dalam dokumen perencanaan
Kapasitas Sumber Daya Manusia belum memadai	Belum adanya Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang baku, sehingga alur/tahapan pelaksanaan perjanjian kerja sama masih mengalami kendala		
	Rendahnya pemahaman ASN dalam penguasaan teknologi dan legitalasi		

Dari permasalahan dan hambatan yang telah disampaikan maka ini juga berdampak pada tata kelola Pemerintahan yang dimanifestasikan dalam berbagai skala baik berupa Aparatur Negeri Sipil (ASN) yang kurang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, dalam memberikan respon, kolaboratif dan komunikasi, optimalisasi pelayanan publik, akuntabilitas serta pengawasan yang intensif sehingga tidak maksimal dalam mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani sebagaimana yang telah tercantum dalam Visi dan Misi Kepala Daerah.

Ini merupakan tantangan, sehingga peluang yang dapat diambil dalam upaya meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah yang perlu diambil oleh Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dan konsultasi guna menyamakan persepsi sebelum melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan.
- b. Melakukan cek dan ricek kesiapan teknis operasional dan kerja sama dengan pihak ketiga untuk ikut serta dalam penyelesaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan.
- c. Perlunya adanya pelatihan atau bimtek bagi sumber daya manusia dibagian keprotokolan, penyiapan materi pimpinan (foto grafer) dan bagian perencanaan dan kepegawaian Setda.
- d. Meningkatkan kerjasama dengan media elektronik dan media cetak dalam Penyebarluasan Informasi baik penyelenggaraan pemerintah maupun penyelenggraan informasi pembangunan daerah;

Diakui bahwa belum sepenuhnya masalah dan hambatan pencapaian kinerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku Tahun 2022 telah teratasi. Oleh karenanya akan tetap mendapat perhatian pada tahun berikutnya.

D. Review Usulan Program dan Kegiatan Biro Administrasi Pimpinan Setda

NO	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator/Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Lokasi	Indikator/Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	2	4		5		4			5	
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi									
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		870,000,000				204,449,777	
			Daerah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jakarta, Kota Ambon			210,000,000	Jakarta, Kota Ambon			204,449,777	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Ambon			210,000,000	Kota Ambon			-	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Ambon			150,000,000	Kota Ambon			-	
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jakarta, 11 Kab/kota			150,000,000	Jakarta, 11 Kab/kota			-	
1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Kab/kota			150,000,000	12 Kab/kota			-	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				-				16,250,000	
2.1	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ambon			-	Ambon			16,250,000	

3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				610,000,000				299,823,500	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Ambon			150,000,000	Kota Ambon			199,962,500	
3.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jakarta, Kota Ambon			210,000,000	Jakarta, Kota Ambon			99,861,000	
3.3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jakarta, Kota Ambon			250,000,000	Jakarta, Kota Ambon			-	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah				771,480,000				490,409,000	
4.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Ambon			85,000,000	Kota Ambon			63,001,000	
4.2	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jakarta dan 11 Kab/kota			65,000,000	Jakarta dan 11 Kab/kota				
4.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Kab/kota			621,480,000	11 Kab/kota			427,408,000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,150,000,000				128,570,000	
5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ambon			400,000,000	Ambon			-	
5.2	Pengadaan Mebel	Ambon			250,000,000	Ambon			51,660,000	
5.3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Ambon			200,000,000	Ambon			-	
5.4	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Ambon			300,000,000	Ambon			76,910,000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				953,570,000				753,984,368	
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ambon			25,000,000	Ambon			10,000,000	
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ambon			45,000,000	Ambon			13,010,000	
6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ambon			25,000,000	Ambon			11,010,000	

6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ambon			858,570,000	Ambon			719,964,368	
7	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				180,500,000				132,429,000	
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ambon			180,500,000	Ambon			132,429,000	
8	Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan				1,442,000,000				273,336,444	
8.1	Penyiapan Materi Pimpinan	Jakarta dan 11 Kab/Kota			377,000,000	Jakarta dan 11 Kab/Kota			163,002,500	
8.2	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Jakarta dan 11 Kab/Kota			315,000,000	Jakarta dan 11 Kab/Kota			50,346,127	
8.3	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jakarta dan 11 Kab/Kota			750,000,000	Jakarta dan 11 Kab/Kota			59,987,817	
9	Fasilitas Keprotokolan				977,000,000				200,729,329	
9.1	Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jakarta dan 11 Kab/Kota			250,000,000	Jakarta dan 11 Kab/Kota			59,510,000	
9.2	Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jakarta dan 11 Kab/Kota			367,000,000	Jakarta dan 11 Kab/Kota			69,495,329	
9.3	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jakarta dan 11 Kab/Kota			360,000,000	Jakarta dan 11 Kab/Kota			71,724,000	
	Total				6,954,550,000	Total				2,499,981,418

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Biro Administrasi Pimpinan Setda

Untuk membangun hubungan yang sinergis berdasarkan fungsi dan kewenangannya, maka Biro Administrasi Pimpinan Setda memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis terutama dalam melaksanakan pelayanan informasi, administrasi dan bahkan berbagai aspek fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga dapat menjalankan roda Pemerintahan Daerah.

Tujuan dan Sasaran yang erat kaitannya dengan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, sehingga tujuan dan sasaran ini merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Sedangkan sasaran ialah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program masing-masing bidang.

Beranjak dari Visi *“Maluku yang terkelola secara Jujur, Bersih dan Melayani, terjamin dalam Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan”* dan Misi ke – 1 *“Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani”* maka yang menjadi Tujuan Biro Administrasi Pimpinan Setda ialah;

1. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih
2. Meningkatkan kerjasama antar pemerintahan

Dengan Sasaran yakni;

1. Meningkatnya kinerja pemerintah daerah
2. Terwujudnya kolaborasi antar pemerintah dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif.

B. Program dan Kegiatan

Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah di ukur dari pencapaian yang terdapat dalam Indikator Kinerja Utama Daerah pada Biro Administrasi Pimpinan Setda, yakni peliputan kegiatan pemerintah Daerah di dalam dan di luar Daerah, terfasilitasinya komunikasi pimpinan, informasi yang tersebar, kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi, kunjungan tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terlaksananya hubungan antrara keprotokolan dan terwujudnya koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian. Ini merupakan potret Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang di dukung melalui Perjanjian Kerja Perangkat Daerah dengan Biro Administrasi Pimpinan Setda.

C. Uraian garis besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Jumlah Program dan Kegiatan tahun 2023 pada Biro Administrasi Pimpinan Setda meliputi 1 (satu) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan dan 19 (sembilan belas) Sub kegiatan dengan total pagu indikatif Rp.2.499.981.418,- dengan pembagian pada masing-masing Kegiatan/Sub kegiatan sebagai berikikut ;

No	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	204.449.777,-	
1.1.1	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	204.449.777,-	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.250.000,-	
1.2.1	Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan	16.250.000,-	

	SKPD		
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	299.823.500,-	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya	199.962.500,-	
1.3.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	99.861.000,-	
1.4	Administrasi umum Perangkat Daerah	490.409.000,-	
1.4.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	63.001.000,-	
1.4.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	427.408.000,-	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.570.000,-	
1.5.1	Pengadaan Mebel	51.660.000,-	
1.5.2	Pengadaan asset tetap lainnya	76.910.000,-	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	753.984.368,-	
1.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,-	
1.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.010.000,-	
1.6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.010.000,-	
1.6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	719.964.368,-	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	132.429.000,-	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	132.429.000,-	
1.8	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	273.354.444,-	
1.8.1	Penyiapan Materi Pimpinan	163.002.500,-	

1.8.2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	50.364.127,-	
1.8.3	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	59.987.817,-	
1.9	Fasilitasi Keprotokolan	200.729.329,-	
1.9.1	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	59.510.000,-	
1.9.2	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	69.495.329,-	
1.9.3	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	71.724.000,-	
TOTAL		2.499.999.418,-	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

A. Rencana Kerja

Kedudukan Rencana Kerja adalah sebagai kerangka dasar dalam melaksanakan operasional tugas pokok dan fungsi organisasi Biro Administrasi Pimpinan Setda, dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Sasaran Kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk menunjang Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Arah kebijakan yang ditetapkan disesuaikan dengan fungsi masing-masing. Meningkatkan kualitas peliputan, membangun data base, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, meningkatkan jaringan informasi dan publikasi dengan seluruh pihak terkait, mengembangkan suatu prosedur dan mekanisme tata laksana penyelenggaraan pemerintah terutama yang terkait dengan aktifitas kerja resmi pimpinan pemerintahan sehingga tercipta proses yang efektif dan efisien, melakukan koordinasi secara terpadu dengan BAPPEDA, BPKAD dan *stakeholder*, melakukan monitoring dan evaluasi program dan penganggaran lingkup Sekda secara terpadu dan berkelanjutan, juga meningkatkan kompetensi dan kinerja ASN dengan mendorong peningkatan profesionalisme kerja ASN.

B. Pendanaan dan Program Kegiatan

Pendanaan Program dan kegiatan Biro Administrasi Pimpinan Setda merupakan cara penyusunan pendanaan perumusan prioritas serta penghitungan alokasi untuk masing-masing program. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Dalam menetapkan program

dan kegiatan Biro Administrasi Pimpinan Setda Tahun 2019 s.d 2024, harus menyiapkan pendanaan program pembangunan lima tahun kedepan.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku Tahun 2024 memuat program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai perwujudan dari kebijakan program Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Maluku tahun 2019-2024, dengan harapan agar rencana kerja ini dapat memberikan dampak yang positif dan perubahan bagi peningkatan dan pengembangan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian rencana kerja Program dan Kegiatan tahun anggaran 2024 pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku agar dapat dilaksanakan dan outputnya sesuai tujuan RPJMD Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2019-2024.

Ambon, Maret 2023

Kepala Biro Administrasi Pimpinan
Setda Maluku,

Fibra Breemer, S.Pd., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19740921 200003 2 001